

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN
(Studi Kasus di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2019)**

JURNAL



CRISTIAN WAHRLICH LINGGA
NPM : 19.16.0.013

**PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2023**

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2019)

1, Cristian Wahrlich Lingga 2, Amrullah Rasal
3, Ronald Parlindungan Hasibuan,

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
Karyaciptamandiri11@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
amrullahrasal67@gmail.com

³Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
ronaldphsb@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana utama masyarakat untuk menunjukkan politik Dan haknya dalam memilih wakil rakyat yang akan memegang kendali roda pemerintahan perjalanan bangsa dan masa depan. Pilpres 2019 di Kota Batam Kecamatan Sei Beduk mengalami peningkatan partisipasi pemilih Tahun 2019 mencapai 91,5% jika dibandingkan sebelumnya pemilu 2014 sebesar 61,5%. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Angel (Dalam Ross,1967:130).Mengenai faktor-faktor itu mempengaruhi partisipasi. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin meningkatnya Partisipasi Politik Pemilih Kecamatan Sei Beduk pada Pilpres 2019 dipengaruhi oleh Empat faktor,yakni Faktor Usia, Faktor Pendidikan, Faktor Pekerjaan dan Faktor Lama Tempat Tinggal. Dapat Disimpulkan Bahwa Faktor Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sei Beduk Faktor Usia Karena Hampir Rata Rata Pemilih pemula yang Sangat Minim Tingkat Partisipasinya akibat Kurang paham Politik Para Calon Pemimpin Yang Mereka pilih dan Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Juga sangata mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Sei Beduk, Sebagian Masyarakat Sei beduk Masih Ada Yang berkerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Mengakibat kan Tingkat Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pemilihan Presiden.Pemilih Di Kecamatan Sei Beduk yang sudah rasional, karakteristik sosial pemilih, dimana pendidikan di Kecamatan Sei Beduk tergolong tinggi dan merupakan pusat kota yang cenderung memiliki masyarakat terpelajar dan berwawasan luas, yaitu situasi dan lingkungan politik pada Pilpres 2019.

Kata kunci : Faktor Mempengaruhi Partisipasi Politik, Pilpres 2019, Sei Beduk.

ABSTRACK

Elections are the main means for the community to show their politics and rights in choosing representatives of the people who will hold the reins of government for the nation's journey and future. The 2019 presidential election in Batam City, Sei Beduk Subdistrict experienced an increase in voter participation in 2019 reaching 91.5% when compared to the previous 2014 election of 61.5%. Political participation is the activity of a person or group of people to participate actively in political life, among others by electing state leaders directly or indirectly influencing government policy (Public Policy).

This study aims to look at the factors that influence voter political participation. The theory used in this research is Angel's theory (In Ross, 1967: 130) regarding the factors that affect participation. This research uses Descriptive Method with qualitative research type..

The types of data used in this research are primary data, namely interviews and secondary data obtained from literature studies, documentation and observation.

The results of this study found that the increasing political participation of voters in Sei Beduk Subdistrict in the 2019 presidential election was influenced by four factors, namely the age factor, education factor, employment factor and length of residence factor. It can be concluded that the factors influencing the participation of the Sei Beduk sub-district community are age factors because almost the average beginner voter has a very low level of participation due to a lack of understanding of the politics of the prospective leaders they choose and the factors of work and income also greatly affect the level of participation of the Sei Beduk community, some Sei Beduk people still work in small and medium micro businesses and result in the level of community participation affecting the presidential election. Voters in Sei Beduk Subdistrict who are already rational, social characteristics of voters, where education in Sei Beduk Subdistrict is relatively high and is a city center that tends to have an educated and broad-minded society, namely the situation and political environment in the 2019 Presidential Election.

Keywords : *Factors Influencing Political Participation, 2019 presidential election, Sei Beduk.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Negara yang demokratis mempunyai keunggulan tersendiri, karena dalam pengambilan kebijakan atau keputusan itu di dasarkan pada aspirasi rakyat. Ciri negara yang demokratis dapat di lihat dari seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam pembangunan negara maupun pemilihan kepala pemerintahan. Salah satu peranan penting masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Keterlibatan warga negara dalam secara individu dalam kegiatan politik pada berbagai tingkatan di dalam sistem politik di sebut dengan partisipasi politik.

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan demokrasi. Demokrasi menuntun negara sebagai organisasi untuk sekiranya dapat berjalan dengan stabil. Hal ini dikarenakan demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan ideal yang menjauhkan dari kekuasaan yang absolut terfokus pada tirani kekuasaan, sehingga cenderung terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Secara global demokrasi telah menjadi bagian yang sangat fundamental dalam proses penyelenggaraan. Pada 1999 Indonesia menjadi Negara demokrasi ketiga terbesar di

Dunia. Jika distabilkan dan dikembangkan, hal ini akan merupakan sebuah kemenangan yang bersejarah, bahkan nilai pentingnya akan melalui batas negara itu sendiri.

Pelembagaan demokrasi di Indonesia terus dilakukan semua pihak. Hingga saat ini Indonesia mulai disibukkan dengan memperkenalkan alat demokrasi, untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdemokrasi. Bahkan demokrasi yang diharapkan bukan hanya sekedar demokrasi prosedural akan tetapi demokrasi yang substansial atau yang betul-betul demokrasi itu tercermin dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Salah satu aspek yang bisa dilihat dalam proses berlangsungnya demokrasi dalam suatu negara yaitu dengan adanya partisipasi, secara khusus dalam konteks pemilihan pemimpin negara dalam pemilihan umum.

partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan demokrasi sebab pada dasarnya konsep dasar dari demokrasi tentang dari oleh dan untuk rakyat, salah satu bagiannya yaitu dari rakyat adalah merupakan gambaran bagaimana proses pelibatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan politik termasuk didalamnya memilih dan menunjuk pemimpin-pemimpin Negara seperti Anggota Perwakilan dan serta Eksekutif dalam suatu Negara. Ruang yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan salah satu pilar demokrasi harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang ada dalam proses politik.

Asumsi mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang paling baik bagi dirinya sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan Negara, maka warga Negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam mempengaruhi proses politik dalam pengambilan keputusan politik.

Ciri sebuah Negara demokratis adalah seberapa besar Negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Karena partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik memiliki pengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik memiliki pengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat mempunyai preferensi dan kepentingan masing-masing dalam menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Bukan hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dilihat sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintah.

Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem Pemilu yang lebih baik kedepan. Karena itu argumentasi dan analisis yang lahir harus berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, kedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Sebagai instrumen demokrasi, pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan wakilnya untuk duduk dalam bagian struktur pemerintahan. Pemilu adalah media yang menyalurkan demokrasi yang memberikan kesempatan pada warga yang berkompeten untuk dipilih menjadi wakil rakyat, baik itu eksekutif maupun legislatif. Bahkan jika memenuhi syarat tidak tertutup kemungkinan bahwa warga tersebut bisa dipilih sebagai presiden atau wakil presiden. Hal tersebut adalah bentuk dari asas demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan hak – hak individu selaku warga Indonesia.

Pemilu adalah mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, ditentukan secara damai, memberikan semangat kepada rakyat untuk menggunakan hak suara, akses memberikan hak suara bersifat terbuka, kesetaraan suara- suara sehingga tidak ada suaraa yang dihitung lebih dari yang lain. Hasil pemilu ditentukan melalui aturan sebelumnya, dengan sesedikit mungkin kecurangan dan penipuan dalam pencoblosan dan penghitungan suara.¹

Pemilihan umum adalah ruang bagi masyarakat untuk memilih wakil masyarakat. Pemilu hakikatnya sebuah proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemilu juga merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif di mana seluruh warga masyarakat secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan beragam harapan dan berbagai kepentingan melalui pilihan-pilihan politik yang disalurkan dalam pemilu. Dalam tataran idealitasnormatif, bahkan melalui mekanisme pemilu inilah masyarakat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena itulah dalam konteks pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri².

¹ Eko Harry Susanto, *Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 1 No. 2 (2013), hal. 168

² Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (Padang : UNP Press, 2012), h. 12.

Sei Beduk atau Sungai Beduk adalah sebuah kecamatan di Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah kecamatan ini adalah 120,674 km², dengan jumlah penduduk tahun 2020 ,kepadatan 714 jiwa/km². Kecamatan Sungai Beduk memiliki 68 RW dan 290 RT dan terdiri dari 4 kelurahan, yakni:

- Kelurahan Muka Kuning
- Kelurahan Duriangkang
- Kelurahan Mangsang, dan
- Kelurahan Tanjung Piayu

Kota Batam dikenal sebagai salah satu kota yang multikultural di Indonesia, kemajemukan masyarakat terlihat dalam identitas warga, termasuk etnis dan agama kepercayaan. Masyarakat di kecamatan Sungai Beduk, didominasi oleh suku Melayu, Batak, Minangkabau dan Jawa. Ada juga kelompok etnis lain seperti Tionghoa, Bugis, Nias, Timor, Sunda, Minahasa, dan lainnya.

Bahasa yang digunakan di daerah ini umumnya adalah bahasa Indonesia, juga bahasa Melayu Batam dan bahasa lainnya seperti Batak yang kebanyakan adalah Batak Toba, bahasa Minangkabau, dan bahasa Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Batam 2020, pemeluk agama di kecamatan ini cukup beragam, dimana Islam 68,25%, kemudian Kristen 29,99% (Protestan 25,84% dan Katolik 4,15%), Budha 1,59%, Konghucu 0,07%, Hindu 0,03% dan lainnya 0,07%.

Pekerjaan warga didominasi oleh karyawan swasta dan buruh, atau pekerja industri yang ada disekitar kota Batam. Ada juga yang merupakan pedagang, nelayan, tenaga medis, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pekerja kantoran lainnya termasuk perbankan, dan juga sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya.

Tabel 1.1
Data Penduduk Kecamatan Sei Beduk Bulan Juli 2019

NO	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Penduduk
		RT	RW	LK/PR
1.	Tanjung Piayu	68	17	16,943
2.	Duriangkang	73	15	16,177
3.	Mangsang	110	26	26,067
4.	Mukakuning	44	10	30,278
Total		295	68	89,465

Sumber: Kantor Camat Sungai Beduk 2019³

Menurut Tabel 1.1, dapat dilihat jumlah penduduk bulan juli. Diketahui bahwa terdapat 4 kelurahan di kantor camat sei beduk ini. dimana kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah kelurahan Mukakuning dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berkisar 30,278 orang. Ini sudah termasuk warga negara indonesia dan warga negara asing, jumlah angka tersebut juga sudah termasuk penduduk yang lahir, mati, pendatang baru serta yang pindah. Sedangkan di antara ke 4 kelurahan tersebut yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kelurahan Duriangkang yaitu laki-laki dan perempuan berkisar hanya 16,177 Orang. Jumlah tersebut sudah termasuk warga negara indonesia dan warga negara asing, beserta jumlah penduduk yang lahir, mati, pendatang baru, dan yang pindah. Dapat disimpulkan bahwa total jumlah penduduk pada bulan juli 2019 adalah 89,465 Orang Laki-laki dan Perempuan, dengan jumlah 4 kelurahan dan Rt/Rw 295/68.⁴

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.⁵ Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.⁶

³ Kecamatan Sei Beduk 2019

⁴ Misa Marlina" PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS KANTOR CAMAT SEI BEDUK)"2020,HLM 19

⁵ Miriam Budiarto, Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 21

⁶ Myazinda, Kelompok Sosial dan Kehidupan Masyarakat, (USU Press, Medan, 2008): h.20.

Pilpres adalah rangkaian pemilihan umum, dimana setelah amendemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu.⁷

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.⁸

Tabel 1.2
Data Pemilih Yang Menggunakan Hak PilihNya
Pada Pemilihan Umum Serentak Pada Tahun 2019

No	DATA PEMILIH PEMILU SERENTAK	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	PAR
1.	BATAM KOTA	104.389	86.892	83,2%
2.	BATU AJI	68.835	60.982	88,5%
3.	BATU AMPAR	37.728	29.953	79,3%
4.	BELAKANG PADANG	15.313	11.756	76,7%
5.	BENGGONG	63.036	56.138	89%
6.	BULANG	7.779	6.565	84,3%
7.	GALANG	11.746	10.226	87%
8.	LUBUK BAJA	55.983	42.384	75,7%
9.	NONGSA	48.437	37.133	76,6%
10.	SAGULUNG	115.144	98.128	85,2%
11.	SEI BEDUK	45.218	41.385	91,5%
12.	SEKUPANG	77.268	67.575	87,4%
JUMLAH		650.876	549.117	84%

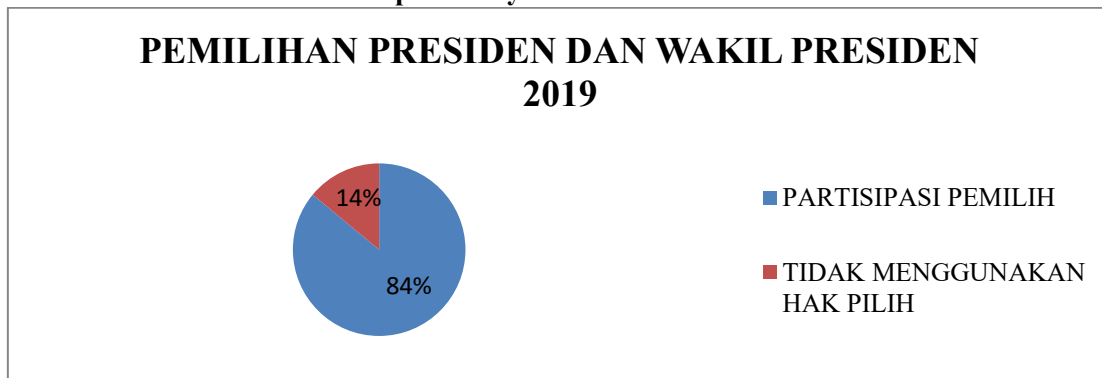
Sumber: KPU Kota Batam⁹

⁷ Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 26

⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.367. 2008

⁹ *KPU Kota Batam*

Tabel 1.3
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019



Sumber: Kpu Kota Batam¹⁰

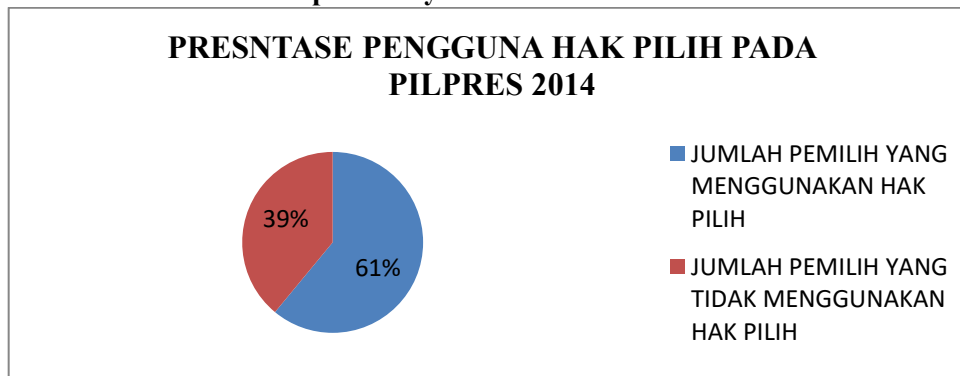
Tabel 1.4
**Data Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya
Pada Pemilihan Umum Serentak Pada Tahun 2014**

No	DATA PEMILIH PEMILU SERENTAK	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	PAR
1.	BATAM KOTA	122.722	77.031	62,7%
2.	BATU AJI	102.699	58.666	57%
3.	BATU AMPAR	47.280	26.951	57%
4.	BELAKANG PADANG	15.041	10.123	67,3%
5.	BENKONG	75.141	10.123	13,4%
6.	BULANG	8.167	5.526	67,6%
7.	GALANG	11.905	7.872	66%
8.	LUBUK BAJA	67.429	37.069	54,9%
9.	NONGSA	48.278	26.956	55,8%
10.	SAGULUNG	117.123	75.546	64,5%
11.	SEI BEDUK	61.774	38.024	61,5%
12.	SEKUPANG	75.344	51.495	68,3%
JUMLAH		752.903	461.516	61%

Sumber: KPU Kota Batam 2019¹¹

¹⁰ KPU Kota Batam

Tabel 1.5
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014



Sumber: KPU Kota Batam 2019¹²

Terlihat permasalahan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden salah satunya yang terjadi pada daerah kecamatan Sei Beduk yang dimana pada pilpres Tahun 2014 angka Partisipasi 61,5% lebih rendah di bandingkan angka Partisipasi pada pilpres Tahun 2019 91,5% dengan daftar pemilihan tetap kecamatan Sei Beduk adalah sebesar 45.218 yang ada di 4 kelurahan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan hak pilih pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kecamatan Sei Beduk tergolong cukup tinggi. Jumlah Daftar Pemilih 45.216 dan Jumlah Pengguna Hak pilih 41.385. Pada Tahun 2014 Jumlah Pemilih 61.774 dan jumlah Pengguna Hak pilih 38.024. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik dan faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan Presiden tahun 2019, maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut. Adapun penelitian akan menggali mengenai bentuk partisipasi politik apa saja yang dilaksanakan oleh Masyarakat diKecamatan Sei Beduk. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pilpres diwilayah kecamatan Sei Beduk Kepulauan Riau . penelitian ini mengambil judul: partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres Tahun 2019 Di Kecamatan Sei Beduk Kepulauan Riau.

Rumusan Masalah

Apa faktor Yang Mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Sei Beduk?

Tujuan Penelitian

Mengetahui pelaksanaan demokrasi Di Kecamatan Sungai Beduk dengan momentum pemilihan umum.

Untuk mengetahui fakto-faktor mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Sei Beduk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan dampak sebagai bahan riset dan ilmu pengetahuan dengan memaparkan teori-teori pemikiran ilmiah. Selain itu dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan peneliti dan pembaca pada umumnya serta lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang demokrasi di Kecamatan Sungai Beduk dan partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) di Kecamatan Sungai Beduk.

B. Secara Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan dan keterampilan dalam menyusun dalam menyusun sebuah penelitian karya tulis ilmiah.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pengetahuan, pengalaman dan masukan terhadap pelaksanaan praktik demokrasi dan partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum di Kecamatan Sungai Beduk.

METODE PENELITIAN

1) Penelitian pertama ditulis Muhammad Rifqi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KPU Kota Surabaya dan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2019. Dalam penelitian ini, hasil penelitian dapat menentukan visi dan misi, merencanakan dengan pemetaan dan menetapkan tujuan, membuat program, metode atau metode yang digunakan, kerjasama dengan pihak luar. KPU Kota Surabaya dipetakan berdasarkan gender, sosial budaya dan 11 daerah pemilihan di 11 daerah pemilihan. Tujuan dari program ini adalah untuk melatih relawan demokrasi dan menciptakan platform bagi warga negara yang sadar demokrasi (memilih). Sementara itu, KPU Kabupaten Tuba telah memetakan gender, agama, dan 11 basis pemilih, dan programnya adalah melatih relawan prodemokrasi dan bekerja sama dengan kelompok perempuan untuk membawa pemilu serentak 2019 ke pengadilan. Merekrut relawan pengunjuk rasa sangat efektif membantu KPU meningkatkan jumlah pemilih. Meski begitu, bekerja dengan perempuan dan menciptakan platform bagi warga pro-demokrasi dapat

membantu memahami pemilih sehingga mereka dapat terlibat dalam menggunakan haknya dalam pemilu serentak 2019.

- 2) Penelitian Kedua ditulis Siti Zaenab Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui strategi komunikasi KPUD. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa analisis dan segmentasi khalayak juga harus dilakukan dengan menemukan apa yang menjadi tujuan dari program yang dilaksanakan. Analisis ini sangat penting karena bentuk desain tergantung pada jenis audiens. Pengembang komunikasi harus membagi audiens menjadi setidaknya tiga kelompok. Pertama, latent public, yaitu kelompok yang bermasalah tetapi tidak mendapat perhatian lebih. Kedua, publik, yaitu kelompok yang bertanggung jawab atas masalah tersebut diberitahu. Sedangkan yang terakhir adalah khalayak aktif, yaitu. H. Kelompok yang bertindak atas isu-isu seperti, pemetaan tipologi pemilih melalui tren publik. Pemilihan media sangat penting, memperhatikan setiap tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD. Proses tersebut juga menghadapi kendala terbesar, yaitu kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat.
- 3) Penelitian Ketiga ditulis R. Priadi and K. Roisyah penelitian ini dibahas mengetahui seperti apa partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum, serta menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum, penelitian ini juga akan mengkomporasikan upaya peningkatakan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia dengan keterwakilan perempuan ditingkat global.

PEMBAHASAN

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Pulau Batam di huni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam dan kini menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam).¹³ Sejak berdirinya Kota Batam sampai saat ini wali kota yang pernah memimpin Kota Batam secara berturut-turut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Wali Kota Batam dari Masa ke Masa

No	Nama	Periode
1	Ir. H. Raja usman Draman	1983-1989
2	Drs. H. Raja Abdul Aziz	1989-1999
3	Drs. H. Nyat Kadir	2001-2005
4	Drs. H. Ahmad Dahlan	2006-2011
5	Drs. H. Ahmad Dahlan	2011-2016
6	H. Muhammad Rudi, S.E., M.M.	2016-2021
7	H. Muhammad Rudi, S.E., M.M.	2021-2024

Sumber: Diskominfo Kota Batam Tahun 2021

b. Visi dan Misi Kota Batam

Visi Kota Batam untuk tahun 2021-2026 adalah terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern dan sejahtera. Sebagai tindak lanjut dari visi Kota Batam tahun 2021-2026, maka dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

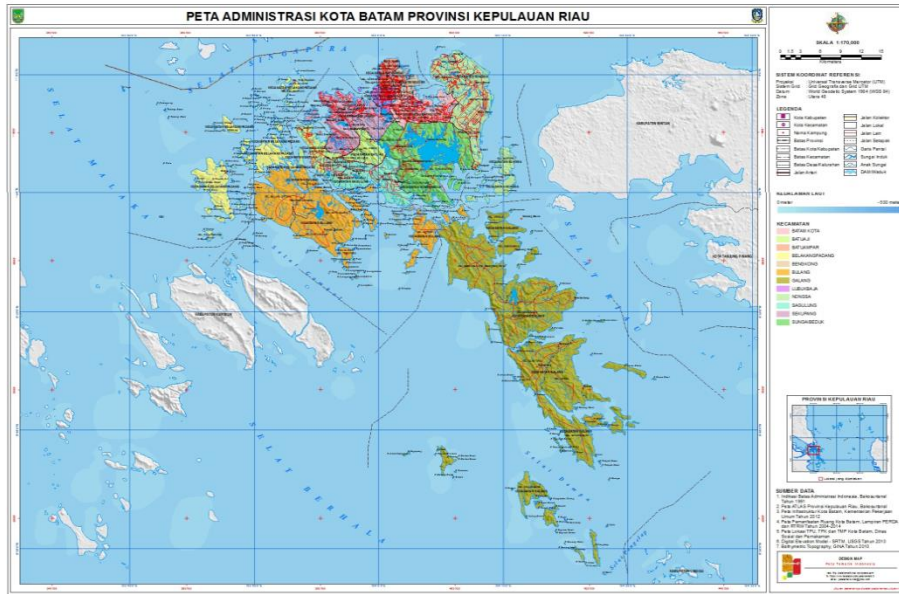
- 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diverifikasi kegiatan ekonomi berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
- 2) Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan di dukung infrastruktur, utilitas, dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri, dan nyaman sesuai tata ruang
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak
- 4) Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

c. Kondisi Geografis Kota Batam

Secara geografis, Kota Batam mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional dengan jarak 12,5 mil laut dari Negara Singapura. Kota Batam terletak antara 0°25' 29" LU-1°15'00" LU - 103°34' 35" BT -104°26'04"BT. Luas wilayah Kota Batam mencapai 3.868,97 km². Adapun batas-batas wilayah Kota Batam yaitu :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Singapura
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Binan dan Tanjung Pinang
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kota Batam



Sumber: Bappeda Kota Batam, 2011¹⁴

Berikut jumlah kelurahan menurut kecamatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Nama Kecamatan, Kelurahan Tahun 2017-2021 Kota Batam

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan Kota Batam 2017-2021				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belakang Padang	6	6	6	6	6
2	Bulang	6	6	6	6	6
3	Galang	8	8	8	8	8
4	Sungai Beduk	4	4	4	4	4
5	Sagulung	6	6	6	6	6
6	Nongsa	4	4	4	4	4
7	Batam Kota	6	6	6	6	6
8	Sekupang	7	7	7	7	7
9	Batu Aji	4	4	4	4	4
10	Lubuk Baja	5	5	5	5	5

¹⁴ Bappeda Kota Batam, 2011

11	Batu Ampar	4	4	4	4	4
12	Bengkong	4	4	4	4	4
Jumlah		64	64	64	64	64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam, Kota Batam dalam Angka 2022¹⁵

2. Deskripsi Umum Kecamatan Sungai Beduk

a. Sejarah Kecamatan Sungai Beduk

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi Otonomi Daerah tersebut dikonstruksikan dalam sistem Negara Kesatuan, maka laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan salah satunya Profil Kecamatan yang merupakan sarana penting sebagai bentuk gambaran umum wilayah Pemerintah Kecamatan. Dalam gambaran Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sungai Beduk yang diuraikan dalam Profil Kecamatan sebagai wujud nyata serta upaya untuk memetakan kondisi potensi dan sumber daya daerah, sehingga dapat dengan mudah untuk mengenali adanya peluang pengembangan daerah dalam era persaingan bebas dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Profil Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2022 memberikan gambaran umum tentang adanya kondisi fisik, karakteristik sosiodemografis, kondisi sosial politik dan sosial budaya, perekonomian daerah, sarana dan prasarana (infrastruktur) Pemerintahan dan sumber pembiayaan, serta kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sungai Beduk terangkum dalam buku profil Kecamatan yang akurat. Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022 di Kecamatan Sungai Beduk berpedoman pada Visi dan Misi Kecamatan yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan visi dan misi Kota Batam.

b. Visi dan Misi Kecamatan Sungai Beduk

Adapun visi dari Kecamatan Sungai Beduk sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermatabat

Misi

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dibidang Perizinan dan non Perizinan secara Profesional.

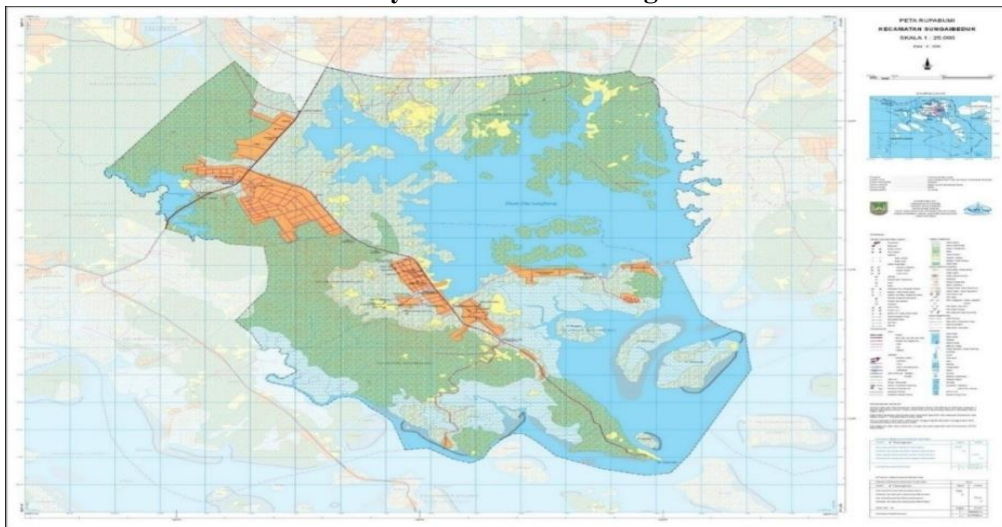
- ❖ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mengkoordinasikan dan Membina Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu.

c, Kondisi Geografis Dan Batas Wilayah

Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam merupakan unsur pelaksanaan teknis Otonomi Daerah di Bidang Pelayanan Publik, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam. Secara administrasi Kecamatan Sungai Beduk dibagi menjadi 4 (empat) Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan Kecamatan Sungai Beduk Luas Wilayah Daratan Kecamatan Sungai Beduk 10 597 HA dan Luas Wilayah Perairan Kecamatan Sungai Beduk 1 484 HA. Kecamatan Sungai Beduk terdiri dari 4 (Empat) Kelurahan, yaitu :

- 1) Kelurahan Tanjung Piayu
- 2) Kelurahan Muka Kuning
- 3) Kelurahan Duriangkang
- 4) Kelurahan Mangsang

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kecamatan Sungai Beduk



Sumber: Profil Kecamatan Sungai Beduk 2022¹⁶

Kecamatan Sungai Beduk terletak antara : - 0 o 55' 00" - 1 o 15' 00" Lintang Utara -103o 45' 00" - 104o 10' 00" Bujur Timur. Kecamatan Sungai Beduk berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Batam Kota
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nongsa

3. Deskripsi Komisi Pemilihan Umum

KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia. Sebutan KPU tersendiri bagi masyarakat Indonesia mulai akrab terdengar sejak era pasca reformasi. Lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebenarnya sudah ada, di era Presiden Soekarno lembaga penyelenggaraan pemilu itu dinamai dengan sebutan PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) berdasarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan PPI.

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

1. dasar dalam pelayanan publik harus lebih ditingkatkan agar masyarakat

Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang di kemukakan, maka dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bentuk partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sei Beduk pada pemilihan presiden tahun 2019 yaitu partisipasi politik bentuk konvensional dalam hal ini pemberian hak suara. Bentuk partisipasi politik ini adalah bentuk yang paling banyak digunakan masyarakat Kecamatan Sei Beduk sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Masyarakat yakin dengan kesukarelaannya berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2019 adalah salah satu bentuk dari langkah nyata agar negara bisa memiliki pemimpin yang dapat mendengarkan keinginan dan harapan rakyat untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang pro rakyat.

Disamping itu, antusiasme yang dimiliki oleh Masyarakat Kecamatan Sei Beduk untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2019 dapat dikatakan tinggi. Sebelum menentukan pilihannya mereka mencari informasi tentang paslon yang akan dipilih melalui berbagai sumber yang terpercaya agar terhindar dari informasi palsu.

2. Faktor yang Mempengaruhi

Faktor Mempengaruhi yang dialami oleh pemilih Kecamatan Sei Baduk yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemilih yang otonom, dan kurangnya dukungan lingkungan sekitar. Kebijakan induk yang berubah-ubah dalam hal ini yaitu pemerintah yang selalu merubah undang-undang atau mekanisme Pilpres yang membuat pemilih enggan datang ke TPS. Pemilih pemula yang otonom, pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Faktor kurangnya dukungan untuk mensukseskan Pemilihan Presiden tahun 2019 membuat pemilih menjadi tidak percaya diri bahwa suaranya berpengaruh bagi masa depan Indonesia, hal itu terjadi karena biasanya kurang dukungan dari lingkungan sekitar tempat tinggal pemilih. Dapat Disimpulkan Bahwa Faktor Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sei Beduk Faktor Usia Karena Hampir Rata Rata Pemilih pemula yang Sangat Minim Tingkat Partisipasinya akibat Kurang paham Politik Para Calon Pemimpin Yang Mereka pilih dan Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Juga sangat mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Sei Beduk, Sebagian Masyarakat Sei beduk Masih Ada Yang berkerja UMKM dan Mengakibatkan Tingkat Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pemilihan Presiden.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemilih hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik, serta menjauhkan diri dari perasaan tidak mampu atau minder.

2. Dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta para tokoh masyarakat melalui pendidikan politik secara dini pada pemilih pemula dapat meningkatkan kualitas peran pemilih pemula dalam dunia politik.
3. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilih dalam dunia politik, serta pemberian pendidikan politik yang ditunjukkan khusus untuk pemilih sehingga dapat merangsang keinginan pemilih untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Bagi pemilih di Kecamatan Sei Beduk ikut serta dalam pemilu serentak 2019 ini tentu menjadi sangat berarti karena hal ini akan menjadi pengalaman dan menjadi pembelajaran untuk pemilih di Kecamatan Sei Beduk

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), h. 59.

Meytisen Hendra Ngongoloy, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan. Jurnal Ilmu Politik Vol. 4 No. 1(2016), hal 3

Miaz, Yalvema. Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi,(Padang: UNP Press, 2012), hal. 20

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. Parlemen di Negara Islam Modern, Hukum Demokrasi, Pemilu,dan Golput, (Jakarta: Al-Kautsar, 2016), hal. 120

Eko Harry Susanto, Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum, Jurnal KajianKomunikasi, Vol. 1 No. 2 (2013), hal. 168

Yalvema Miaz, Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi (Padang : UNP Press, 2012), h. 12.

Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), h. 56.

Yalvema Miaz, Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi (Padang : UNP Press, 2012), h. 21.

Andriyus. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi.” *Journal of Government, Social and Politics*, (September2013)

Damita, Nabillah Ayu. “Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kabupaten Lumajang.” *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kabupaten Lumajang*, (Mei 2013)

Fatimah, Siti. “Kampanye sebagai Komunikasi Politik.” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, (Juni 2018)

Linayati Lestari.” *Perilaku Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Si Beduk, Kota Batam)*”,(Desember 2017)

Nur Wardhani, Primandha Sukma. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum.” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Juni 2018)

Subekti, Tia. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)." Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, (2014)

Johan Sabara, Amrullah Rasal." Implementasi Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Di Kota Batam Tahun 2019", (April 2019)

LIPI Jurnal Penelitian Politik, Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019. Volume 16, Nomor 01, 2019.

Solihah Ratnia, Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. Volume 3, Nomor 01, 2018.

Zuhro Siti R, Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. Volume 16 No.01, 2019

Ramlan, Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1999

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2008

Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur".